

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Tangerang**

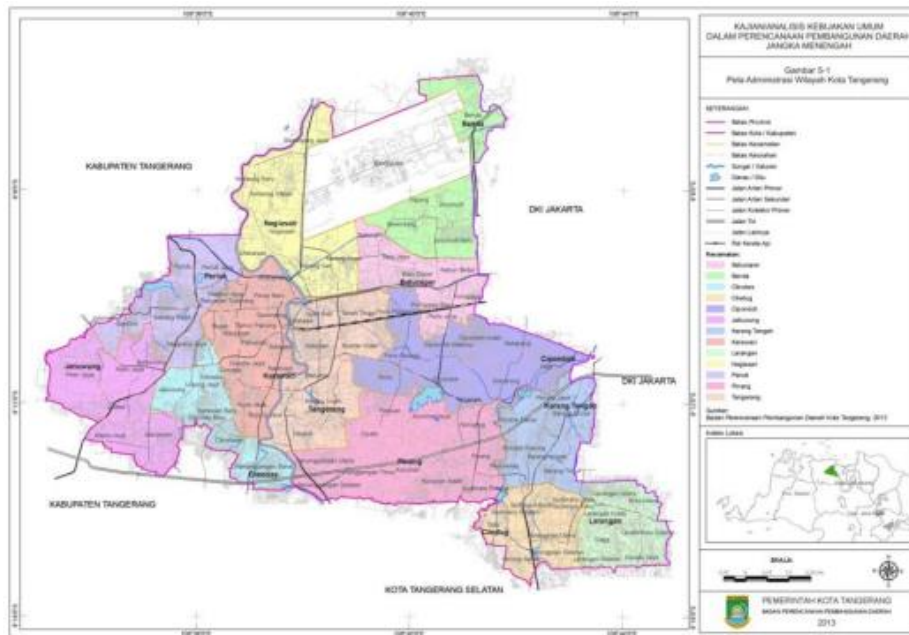
##### **2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Kota Tangerang adalah  $\pm 184,24$  km<sup>2</sup> (termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta seluas  $\pm 19,69$  km<sup>2</sup>). Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua (Kab. Tangerang) serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan;
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kab. Tangerang
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta

**Gambar 2.1**

**Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang**



Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

**2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Kota Tangerang merupakan kota yang berada di bagian Timur Provinsi Banten. Kota Tangerang berjarak kurang lebih 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan kurang lebih 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang mendapatkan dampak positif dan negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya transportasi yang terpadu dengan wilayah Jabodetabek, serta aksesibilitas yang baik terhadap transportasi nasional dan internasional seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Bojonegara. Letak geografis Letak Kota

Tangerang yang strategis mendorong basis perekonomian seperti pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa saat ini. Kondisi tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

### 2.1.3 Kondisi Demografi Kota Tangerang

Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di kota Tangerang yaitu sebanyak 2.185.304 jiwa dan laju pertumbuhan rata-rata yaitu 2,46 % per tahunnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi ke Kota Tangerang karena daerahnya strategis berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta dan sebagai kota jasa, perdagangan, dan pemukiman.

**Tabel 2.1**

#### **Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2000	2010	2018	2000-2010	2010-2018
1.	Ciledug	92.791	147.023	198.448	4,77	3,82
2.	Larangan	115.056	163.901	203.644	3,63	2,75

3.	Karang Tengah	86.248	118.473	142.512	3,26	2,75
4.	Cipondoh	124.426	216.346	316.516	3,26	2,34
5.	Pinang	105.129	160.206	210.086	5,57	4,87
6.	Tangerang	111.219	152.145	182.794	4,30	3,45
7.	Karawaci	147.426	171.317	180.396	2,95	2,32
8.	Jatiuwung	116.582	120.216	124.492	1,39	0,65
9.	Cibodas	117.796	142.429	154.765	0,33	0,44
10.	Periuk	99.596	129.384	148.829	1,62	1,04
11.	Batu Ceper	70.759	90.590	102.539	2,62	1,77
12.	Neglasari	80.306	103.504	118.000	2,37	1,56
13.	Benda	58.382	83.017	102.283	2,56	1,65
	Kota Tangerang	1.325.854	1.798.601	2.185.304	2,70	2,64

Sumber : BPS (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Cipondoh yaitu sebanyak 316.516 jiwa, sedangkan wilayah

yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Benda sebanyak 78 584 jiwa.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang selama tahun 2010 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 2,56% per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu di Kecamatan Cipondoh sebesar 4,87 % per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah yaitu di Kecamatan Jatiuwung sebesar 0,44% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat Kota Tangerang menjadi padat. Setiap kilomernya dihuni oleh 13.280 jiwa dengan Kecamatan Ciledug sebagai kecamatan terpadat dengan penghuni 13.280 jiwa untuk setiap kilometer persegi. Kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya yaitu Kecamatan Neglasari dengan penghuni sebanyak 7.338 jiwa untuk setiap kilometer persegi.

Menurut rasio jenis kelamin, jumlah penduduk di Kota Tangerang untuk penduduk perempuan yaitu terdapat 104,10 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Komposisinya didominasi oleh penduduk dengan usia produktif dan rasio beban ketergantungan sebesar 37,8 atau setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 37,8 penduduk usia non produktif.

**Tabel 2.2**

**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang  
2018**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
---------------	-----------	-----------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	104.289	100.583	204.872
5-9	95.680	92.406	188.086
10-14	76.198	73.562	149.760
15-19	80.890	82.836	163.726
20-24	103.259	98.223	201.482
25-29	115.574	110.924	226.498
30-35	113.791	107.997	221.788
35-39	99.537	97.449	196.986
40-44	87.800	85.469	173.269
45-49	74.978	72.357	147.335
50-54	60.873	56.763	117.636
55-59	47.172	41.249	88.421
60-64	26.799	21.424	48.223
65-69	14.543	12.747	27.290
70+	13.230	16.702	29.932
Kota Tangerang	1.114.613	1.070.691	2.185.304

Sumber : BPS (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa menurut kelompok umur, jumlah penduduk di Kota Tangerang tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk pada kelompok usia anak 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 542.718 jiwa. Sedangkan,

pada kelompok usia 15-64 tahun yang merupakan usia produktif, jumlah penduduknya yaitu 1.588.364 jiwa. Hal ini perlu diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam berbagai sektor yaitu pendidikan, kesehatan, transportasi, dsb.

#### 2.1.4 Gambaran Ekonomi Kota Tangerang

Pembangunan di suatu negara ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berarti apabila diikuti dengan pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Peningkatan serta pemerataan kesejahteraan termasuk permasalahan kemiskinan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menunjang seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.

**Tabel 2.3**

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota se Provinsi Banten  
Tahun 2015-2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Kab. Pandeglang	124,42	115,90	117,31	10,43	9,67	9,74

Kab. Lebak	126,42	111,21	111,08	9,97	8,71	8,64
Kab. Tangerang	191,12	182,52	191,62	5,71	5,29	5,39
Kab. Serang	74,85	67,92	69,10	5,09	4,58	4,63
Kota Tangerang	102,56	102,88	105,34	5,04	4,94	4,95
Kota Cilegon	16,96	14,90	14,89	4,10	3,57	3,52
Kota Serang	40,19	36,40	36,97	6,28	5,58	5,57
Kota Tangerang Selatan	25,89	26,38	28,73	1,69	1,67	1,76
Provinsi Banten	690,67	658,11	675,04	5,90	5,42	5,45

Sumber : BPS Provinsi Banten,2018

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa Kota Tangerang menduduki posisi keenam dengan jumlah kemiskinan tertinggi, meski angka kemiskinan di Kota Tangerang mengalami penurunan namun masih tergolong cukup tinggi.

Pengukuran kemiskinan selain dari penambahan dan pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat keparahan kemiskinan.



**Tabel 2.4****Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2017**

No.	Kabupaten / Kota	Keparahan Kemiskinan (%)			
		2014	2015	2016	2017
1.	Pandeglang	0,20	0,37	0,24	0,25
2.	Lebak	0,15	0,34	0,21	0,22
3.	Kab. Tangerang	0,11	0,18	0,18	0,13
4.	Serang	0,06	0,15	0,05	0,19
5.	Kota Tangerang	0,06	0,26	0,10	0,17
6.	Kota Cilegon	0,03	0,07	0,13	0,15
7.	Kota Serang	0,08	0,26	0,11	0,16
8.	Kota Tangerang Selatan	0,03	0,05	0,08	0,07
Provinsi Banten		0,18	0,69	0,17	0,17

Sumber: Analisis Kemiskinan Kota Tangerang 2017

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa tahun 2014 pengeluaran antara penduduk miskin bernilai indeks yaitu 0,06, kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 0,26. Hal ini menggambarkan penyebaran pendapatan sesama penduduk miskin yang semakin mengalami ketimpangan. Nilai indeks yang

semakin tinggi maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan antara di antara penduduk miskin. Kemudian tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan yaitu 0,17 atau atau lebih buruk dibanding tahun 2016.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah kemiskinan di Kota Tangerang mengalami penurunan namun angka kemiskinan di Kota Tangerang masih cukup tinggi dan indeks keparahan kemiskinannya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang artinya tingkat keparahan kemiskinannya juga tinggi.

Salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan yaitu ketenagakerjaan.

**Tabel 2.5**

**Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang bekerja di Kota Tangerang tahun 2017**

Golongan Umur	Lapangan Usaha Pekerjaan Utama					
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa- Jasa	Lainnya	Jumlah
15-19	0	8.468	12.985	4.882	5.796	32.131
20-24	3.292	36.887	32.913	23.296	24.718	121.106
25-29	0	47.370	32.750	26.285	49.509	155.914
30-34	968	43.234	32.004	24.970	33.180	134.356
35-39	0	33.413	36.529	42.793	37.840	150.575

40-44	1.577	28.728	34.630	30.126	28.728	123.789
45-49	0	20.641	32.734	22.317	16.008	91.700
50-54	0	13.091	27.245	26.424	15.310	82.070
≥55	2.780	9.605	25.890	27.426	18.196	83.897
Jumlah (Jiwa)	8.617	240.743	265.034	228.339	229.285	972.018
Persentase (%)	0,89	24,77	27,27	23,49	23,59	100

Sumber : Kota Tangerang dalam Angka, 2018

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa karakteristik pekerja di Kota Tangerang pada tahun 2017 sebagian besar bekerja di sektor industri, perdagangan, serta jasa-jasa. Sementara sektor pertanian merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja.

## 2.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Kota Tangerang yang memiliki kedudukan yaitu melaksanakan

urusan pemerintahan daerah pada bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **2.3 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang**

### **2.3.1 Visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang**

Adanya otonomi daerah membuat Pemerintah Daerah Kota Tangerang dapat memantau penyelenggaraan kesehatan urusan kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan. Keselarasan antara target-target pembangunan kesehatan nasional dengan pembangunan kesehatan yang dalam dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI merupakan hal yang perlu diperhatikan karena mekanisme penyelenggaraan pemerintahan adalah otonomi dalam kerangka NKRI. Maka dari itu, sebagai instansi pemerintahan perumusan visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengacu pada pembangunan kesehatan Kota Tangerang. Penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang merupakan penjabaran dari visi Walikota Tangerang, yaitu :

**“Menjadi Penggerak dalam Mewujudkan Kota Tangerang yang Sehat dan Mandiri.”**

Dasar dan makna dari visi tersebut yaitu terdapat dua komponen dalam rangka mewujudkan suksesnya pembangunan yaitu pemerintah dan masyarakat. Terdapat kesan bahwa kewajiban pemerintah adalah yang melaksanakan pembangunan dan masyarakat sebagai objek pembangunan. Hal ini berarti apabila

tujuan pembangunan tidak tercapai dengan optimal dapat disebabkan oleh pemerintah memiliki keterbatasan yaitu sumber dana dan sumber daya manusia. Hal itu mengakibatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan juga berkurang. Pembangunan saat ini berperan sebagai fasilitator pembangunan serta mendorong partisipasi aktif konstruktif masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan kesehatan, masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan sehingga masyarakat lebih mandiri untuk hidup dengan menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat bebas dari permasalahan kesehatan yang akibat adanya penyakit maupun akibat bencana, lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

### **2.3.2 Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang**

Misi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan merupakan penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian visi perlu ditetapkan misi-misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi. Misi Kota Tangerang merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan agar Visi Kota Tangerang dapat diwujudkan dengan baik. Berdasarkan Visi Kota Tangerang 2014-2018 tersebut, maka misi yang harus dilaksanakan yaitu.

1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang profesional.
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan yang efektif berbasis lingkungan dan masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berorientasi kepada masyarakat. Perlu dilakukan pembinaan internal yaitu pembinaan operasional dan fasilitas kesehatan serta upaya yang berorientasi eksternal yaitu pembinaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat.

#### **2.4 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kesehatan Kota Tangerang**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan berlandaskan asas otonomi serta tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program wali kota sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD. Dinas Kesehatan memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;

- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat : Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas serta fungsi Dinas dan menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan.
3. Bidang- Bidang di Dinas Kesehatan Kota Tangerang :
  - a. Bidang Kesehatan Masyarakat : Dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup melaksanakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, dan penyehatan pangan.
  - b. Bidang Pelayanan Kesehatan : Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan Tradisional, pelayanan kesehatan rujukan termasuk perbekalan kesehatan, peningkatan mutu fasilitasnya, serta kefarmasian.

- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, imunisasi dan krisis kesehatan, surveilans, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan : Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya Kesehatan
- e. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat : Memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.
- f. UPT Instalasi Farmasi : Memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyediaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan pada UPT Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Kesehatan Daerah (Balai Pengobatan).



- g. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah : Memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan uji laboratorium.
- h. UPT Balai Kesehatan Daerah : Memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah beserta keluarganya.

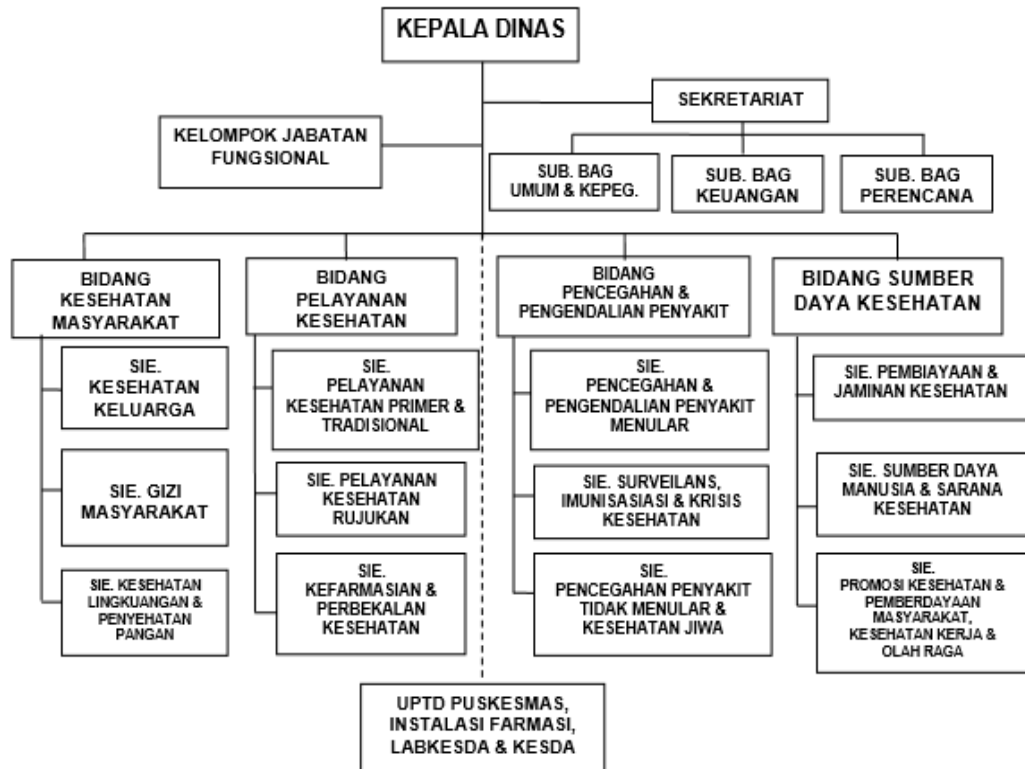
## **2.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang**

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahkan:
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - b. Seksi Gizi Masyarakat;
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyehatan Pangan.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - c. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
  - c. Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
- a. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
  - b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan;
  - c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
7. UPT;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.6 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang



## 2.7 Inovasi Cageur Jasa

Pola serta jenis penyakit yang berkembang menuntut Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan kebijakan baru salah satunya melalui inovasi Cageur Jasa (Colaborasi Kunjungan Rumah Integrasi Keluarga Sehat) yang diluncurkan pada tahun 2017. Cageur Jasa juga utamanya sekaligus menjalankan program PIS-PK Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui agenda Nawacita yang ke-5 dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia serta *Sustainable Development Goals Strategy* (SDGS) 2030 ke-3 untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera bagi

semua usia. Cageur Jasa berperan dalam melihat keadaan riil di lapangan serta pelayanannya dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, dan mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Berikut adalah kelebihan dari Cageur Jasa :

1. Cageur Jasa membantu penemuan kasus sejak dini sehingga penanganan dan monitoring dapat lebih mudah dilakukan.
2. Cageur Jasa membantu dalam memetakan masalah, menganalisis masalah serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan penanganan langsung maupun rujukan. Cageur Jasa juga terintegrasi dengan *Ambulance Gratis (AG)* Kota Tangerang untuk warga yang memerlukan penanganan rujukan.
3. Terintegrasi dengan Sisrute (Sistem Rujukan terintegrasi) untuk mendapatkan layanan aplikasi rujukan yang terhubung dengan *Ambulance SMART 119* ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (FKTL), dan Sijariemas.